

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
RINGKASAN DISERTASI.....	ix
<i>DISSERTASI SUMMARY</i>	xxxii
KATA PENGANTAR.....	liii
DAFTAR ISI.....	lvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Kegunaan Penelitian	17
E. Kerangka Konseptual.....	18
1. Konsep Dasar Administrasi Pemerintahan	18

2. Pejabat Pemerintahan.....19

3.	Kewenangan Pemerintahan dalam Kebijakan Publik.....	20
4.	Diskresi.....	21
F.	Kerangka Teori	23
1.	<i>Grand Theory</i> (Teori Utama): Teori Keadilan.....	23
2.	<i>Grand Theory</i> (Teori Utama): Teori Negara Kesejahteraan.....	29
3.	<i>Middle Theory</i> (Teori Tengah) : Teori Sistem Hukum.....	33
4.	<i>Applied Theory</i> (Teori Aplikasi) : Teori Kewenangan	37
5.	<i>Applied Theory</i> (Teori Aplikasi) : Teori Hukum Progresif	39
G.	Kerangka Pemikiran	54
H.	Metode Penelitian	55
1.	Paradigma Penelitian	55
2.	Spesifikasi Penelitian.....	57
3.	Sifat Penelitian.....	58
4.	Sumber Data Penelitian	60
5.	Metode Pengumpulan Data.....	62
6.	Analisis Data.....	65
I.	Orisinalitas Penelitian	65
J.	Sistematika Penulisan	69
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....		70
A.	Pengertian Birokrasi	70
B.	Tinjauan Tentang Wewenang	95
1.	Pengertian Wewenang	95

2. Sumber Wewenang.....	96
3. Tanggungjawab Pemberi dan Penerima Wewenang	103
C. Tinjauan Tentang Diskresi.....	107
1. Pengertian Diskresi.....	107
2. Tujuan Diskresi.....	119
3. Yang Berwenang Melakukan Diskresi	123
4. Syarat Melakukan Diskresi.....	124
5. Diskresi Sebagai Sarana Penyalahgunaan Wewenang	128
6. Parameter Penyalahgunaan Wewenang Dan Diskresi.....	130
D. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik	143
E. Penerapan Diskresi Pejabat Pemerintahan Dalam Perspektif Islam.....	170

BAB III Diskresi Pejabat Pemerintahan Dalam Memutuskan Kebijakan

Publik Saat Ini.....	187
A. Penerapan Diskresi Pejabat Pemerintahan Dalam Memutuskan Kebijakan Publik Saat Ini.....	187
B. Pertanggungjawaban Diskresi Pejabat Pemerintahan sebelum terbitnya Perma No. 4 Tahun 2015	201
C. Analisis Hukum Mengenai Sifat Melawan Hukum Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006.....	275
D. Pertanggungjawaban Diskresi Pejabat Pemerintahan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016.....	291

E. Batasan Diskresi Pejabat Pemerintahan Dan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang	300
---	-----

BAB IV Kelemahan-Kelemahan Diskresi Pejabat Pemerintahan Dalam Memutuskan Kebijakan Publik Di Indonesia Saat Ini308

A. Kelemahan Substansi Hukum Tentang Diskresi Pejabat Pemerintahan Dalam Memutuskan Kebijakan Publik.....	308
B. Kelemahan Kultur Hukum Tentang Diskresi Pejabat Pemerintahan Dalam Memutuskan Kebijakan Publik.....	328
C. Kelemahan Struktur Hukum Tentang Diskresi Pejabat Pemerintahan Dalam Memutuskan Kebijakan Publik.....	339
1. Kelemahan Pengujian Keputusan Diskresi di PTUN	339
2. Kelemahan Delik Penyalahgunaan Wewenang Dalam Praktik Pengadilan Tipikor.....	344

BAB V Rekonstruksi Diskresi Pejabat Pemerintahan Dalam Memutuskan Kebijakan Publik Berbasis Nilai Keadilan.....356

A. Konsep Diskresi Pejabat Pemerintahan Dalam Memutuskan Kebijakan Publik Menurut Sila Kelima Pancasila.....	356
B. Diskresi Pejabat Pemerintahan Dalam Memutuskan Kebijakan Publik di Beberapa Negara.....	362
1. Negara Inggris.....	362
2. Negara Belanda.....	363

3. Negara Jerman.....366

4. Perbandingan Diskresi di Beberapa Negara dengan Indonesia	368
C. Rekonstruksi Diskresi Pejabat Pemerintahan Dalam Memutuskan Kebijakan Publik Berbasis Nilai Keadilan.....	370
1. Rekonstruksi Nilai	370
2. Rekonstruksi Norma Hukum	374
3. Penemuan Teori Hukum Baru.....	376
BAB VI PENUTUP	377
A. Simpulan	377
B. Saran-Saran.....	383
C. Implikasi Kajian Disertasi	384
1. Implikasi Teoritis.....	384
2. Implikasi Praktis	385
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

